

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM FATWA DSN-MUI
KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BISNIS ASURANSI
SYARIAH DI INDONESIA**

**(Studi Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, PT Jasindo Syariah
Cabang Pontianak dan PT Askrida Syariah Cabang Pontianak)**

**OLEH : FAHMI MURTADHA, S.HI
A.21210054**

ABSTRAK

Indikasi Riba' diketahui lewat perhitungan premi dengan ditemukan adanya praktek pembulatan harga ditinjau dari perhitungan premi yang ditentukan oleh perusahaan asuransi dijumlahkan dengan harga pertanggungan aset nasabah. Gharar diketahui pada saat perusahaan konvensional berkenan untuk menggunakan jasa perusahaan asuransi syariah meng-cover aset mereka. Dana yang dipergunakan untuk membayar premi dan asal-usul harta yang digunakan pada saat pembelian aset oleh nasabah harus ditelisik secara rinci supaya menjaga kehalalan dalam menjalankan bisnis asuransi syariah. Apabila suatu waktu ditemukan bukti-bukti adanya kerusakan dalam akad dimana klausula syariah menjadi patokan utama, maka pada waktu itu pula pertanggungan aset tersebut di-close oleh perusahaan asuransi syariah. Terkait Maysir (perjudian) indikasinya melalui klaim yang disetujui untuk ditangani dan yang tidak berdasarkan moral hazard dan physical hazard.

Diperlukan adanya solusi atas permasalahan tersebut oleh pihak DSN-MUI bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) berbasis agama Islam untuk mengarahkan sesuai menurut syariat Islam sekaligus memberikan pencerahan

kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam bahwa benar asuransi syariah adalah cabang ekonomi berbasis syariah mengedepankan kemaslahatan bagi setiap pelaku kegiatannya serta adanya perlindungan secara yuridis oleh pemerintah khususnya di Indonesia tentang pendirian dan tumbuh-kembangnya asuransi syariah di Indonesia secara khusus diatur dalam perundang-undangan.

Kata kunci : Fatwa DSN-MUI, Peraturan Asuransi di Indonesia dan Kegiatan Asuransi Syariah pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, PT Jasindo Syariah Cabang Pontianak dan PT Askrida Syariah Cabang Pontianak

ABSTRACT

Riba indication 'known through the premium calculation found the practice of rounding off prices in terms of the calculation of the premium is determined by the insurance company summed with the insured client assets. Gharar known at the time of conventional companies deign to use the services of Islamic insurance companies to cover their assets. Funds are used to pay the premium and the origin of the treasure that is used at the time of the asset purchase by the customer must be examined in detail in order to keep halal in running the sharia insurance business. If a time found evidence of damage in the contract clause where sharia become the main criterion, then at the time the asset is also insured in-close by Islamic insurance companies. Related Maysir (gambling) approved indications through claims to be handled and are not based on moral hazard and physical hazard.

There needs to be a solution to these problems by the DSN-MUI in collaboration with Civil Society Organizations (CSOs) based on the Islamic religion to direct the appropriate according to Islamic law while providing

enlightenment to the people of Indonesia, especially the Muslims that the right Takaful is a Shariah-based branches of the economy puts the benefit for each offender activities as well as the juridical protection by the government, especially in Indonesia on the establishment and flowering of Islamic insurance in Indonesia specifically addressed in legislation.

Keywords : Fatwa DSN-MUI, Indonesia's Insurance Regulatory and Takaful activities at PT Asuransi Takaful Umum Branch of Pontianak, Pontianak PT Jasindo Syariah Branch and PT Askrida Syariah Branch Pontianak

I. PENDAHULUAN

Konsep sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan *Aqilah*. Bahkan menurut Thomas Patrick ¹ dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu. Jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *Aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Menurut Rofiq Yunus Al-Mashri,² asuransi adalah perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung untuk sesuatu yang dipertanggungkan. Dari definisi tersebut nampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan “ta`awun”, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko).

Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan Tabarru`. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (life insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan Tabarru` adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta

¹ Thomas Patrick. dalam M.M.Billah. *Principles And Practices Of Takaful And Insurance Compared*, International Islamic University. Malaysia, 2001, hal 4

² http://aanzaainul-belajar.blogspot.com/2012/09/asuransi-syariah-tinjauan-sejarah-dan_18.html . Sabtu, 15 Juni 2013 Pukul 07.13 WIB

asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general insurance).

Pernyataan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukit Tinggi, Ismail Novel usai seminar internasional tentang fatwa di hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (25/12). Beliau mengatakan, *"Tidak semua fatwa digeneralisir. Karena persoalan hukum Islam itu dipengaruhi oleh situasi, kondisi, waktu dan zaman, serta juga adat kebiasaan setempat. Sah saja MUI dituntut memberikan fatwa untuk memberikan jawaban terhadap suatu persoalan, tapi itu sifatnya tidak mengikat. Mengikat itu terhadap orang yang meminta fatwa dan memberikan fatwa."*³ Kemudian diperjelas oleh pernyataan Menko Kesra Agung Laksono, beliau mengatakan, *"Hampir setiap tahun Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Namun aneka fatwa tersebut tampaknya tidak bertaji dan hilang begitu saja. Karena itu seharusnya setiap fatwa disahkan negara dan menjadi materi hukum positif."*⁴

Berdasar kepada pernyataan diatas dipandang perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur asuransi syariah. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada perundang-undangan khusus yang mengatur tentang asuransi syariah secara tersendiri, meskipun RUU asuransi syariah sudah lama diajukan ke DPR dan diharapkan RUU ini segera disetujui DPR sbagaimana RUU perbankan syariah yang telah lebih dulu disetujui belum lama ini.

³ <http://www.merdeka.com/peristiwa/fatwa-mui-tidak-mengikat.html>, Rabu, 17 April 2013 pukul 00.05 WIB

⁴ <http://hukum.kompasiana.com/2012/12/26/statemen-menteri-agama-suryadharma-ali-dan-menko-kesra-agung-laksono-terhadap-fatwa-mui-514185.html>, Rabu, 17 April 2013, pukul 00.37

I. PERMASALAHAN

Dari pernyataan di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan fatwa DSN-MUI dalam kegiatan bisnis asuransi syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan fatwa DSN-MUI oleh pelaku bisnis asuransi syariah?

II. PEMBAHASAN

Mengenai kekuatan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI Menurut Bapak Wajidi selaku Ketua Dewan Fatwa MUI Wilayah Kalimantan Barat, beliau memaparkan mengenai jenis fatwa dan sifatnya yang diedarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), diantaranya:

1. Fatwa Agama dan Sosial bersifat sukarela bertujuan memberikan dasar dan pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi masa kini dengan memberikan kebebasan bagi umat Islam khususnya di Indonesia untuk mematuhi atau sebaliknya mengenai fatwa tersebut.
2. Fatwa Pangan dan Obat-obatan bersifat mengikat dengan dibentuknya Lembaga Pengawas Peredaran Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang disahkan berdirinya akhir 2014 dan disahkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
3. Fatwa Kegiatan Ekonomi bersifat mengikat dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Dalam kegiatannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Asuransi Syariah, Bank Syariah, Unit Usaha

Syariah pada badan usaha konvensional, dan Permodalan Syariah melakukan kegiatannya dengan menjalankan produk syariah, sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi jalannya kegiatan perekonomian berlandaskan syariat Islam .

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa Fatwa DSN-MUI kaitannya dengan kegiatan bisnis syariah memiliki kekuatan hukum dikarenakan telah diakui secara *de jure* dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/IX/2001 menjelaskan tentang maksud dan tujuan pendirian perusahaan asuransi syariah di Indonesia guna menghadapi masa depan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko di kehidupan perekonomian di masa mendatang dengan maksud memenuhi kebutuhan dana apabila terjadi resiko bagi yang memerlukan terlebih di Indonesia penduduknya mayoritas sebagai muslim.

Berkaitan dengan kegiatan asuransi syariah dimana dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan menghindari klausula syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 maka yang diangkat adalah beberapa pengantar dalam fatwa tersebut berkaitan dengan perihal *riba'*, *risywah*, *gharar* dan *maysir* antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصِبُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah [5] : 90)

و أحل الله البيع و حرم الربوا

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. 2: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Qs. 2 : Al-baqarah : 278).

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ طَبِيتُمْ فَلَكُمْ رَعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah [2] : 279)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ يُّدْفَقَا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2] : 280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa [4] : 29).

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون واتقوا الله إن الله شديد العقاب

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5] : 2).

Hadis-hadis Nabi S.A.W tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

“Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas dan Malik dari Yahya).

Di waktu pelaksanaan fatwa tersebut terdapat berbagai kendala dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, diantaranya adalah:

1. Marketing dan Bancass Officer (BAO) pada saat melakukan transaksi dengan calon nasabah mengalami kendala yakni perusahaan asuransi syariah atau unit usaha syariah tidak diperkenankan meng-cover polis dari

nasabah yang tidak menjalankan bisnis sesuai syariah dengan kata lain mereka yang non muslim atau perusahaan yang menjalankan kegiatan secara konvensional mesti diselidiki lebih mendalam mengenai kegiatannya dalam menjalankan bisnis dan asal-usul harta yang dipertanggungjawabkan kepada pihak asuransi bila terjadi resiko dikhawatirkan kegiatan bisnis mereka dan atau asal-usul harta mereka disinyalir mengandung unsur gharar (ketidakpastian kehalalannya).

2. ketika perhitungan premi berdasarkan harga aset yang ditanggung dikalikan dengan besaran yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah yang dihitung dalam persen dan permil terkadang muncul pembulatan yang diharuskan menuju dua angka dibelakang koma atau bahkan nilai mata uang yang tidak lagi diterbitkan nominalnya dalam bentuk uang kartal. Hal ini yang sering menyulitkan bagi pihak teknik dalam menentukan apakah mesti dibulatkan ke besaran Rupiah terdekat bagi nasabah yang membayar tunai ke perusahaan asuransi syariah. Hal ini yang sering menyulitkan bagi pihak teknik dalam menentukan apakah mesti dibulatkan ke besaran Rupiah terdekat bagi nasabah yang membayar tunai ke perusahaan asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Deposito Syariah dalam No. 3/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan secara tersirat mengenai hal ini. Disebutkan dalam klausula tersebut pada Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan Mudharabah pada ayat 3 (tiga) disebutkan, “modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai.” Kemudian pada ayat 4 (empat) menerangkan, “Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam

akad pembukuan rekening.”⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut pihak asuransi syariah menyarankan kepada nasabah membuka rekening di Bank rekanan pihak asuransi syariah guna pembayaran premi sesuai besaran yang ditentukan berdasarkan perhitungan atau membayar dengan uang dalam bentuk tunai sesuai kesepakatan setelah dilakukan pembulatan atas premi tersebut disertai keredhaan dari kedua belah pihak (konsep antaradhin).

3. Permasalahan dari bagian klaim adalah apabila terjadi resiko terhadap harta kepemilikan nasabah, pihak nasabah dibebankan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- kepada pihak asuransi. Hal ini bertujuan supaya nasabah juga ikut menanggung resiko yang terjadi pada harta bendanya dikarenakan harta tersebut sejatinya adalah amanah yang dipercayakan Allah SWT untuk dijaga dan dirawat sepenuhnya oleh nasabah. Adapun peruntukan uang tersebut sebagai dana cadangan bagi nasabah lainnya apabila terjadi musibah.
4. beberapa kasus klaim dari nasabah tidak dapat disetujui untuk ditindaklanjuti berkaitan dengan permasalahan physical hazard, moral hazard dan ketentuan akad yang tertera dalam buku polis asuransi nasabah. Hal ini bertujuan menjaga dari terjadinya kelalaian pihak nasabah dalam mempertanggungjawabkan aset yang berada dalam kuasanya selama penggunaan dan tindakan yang justru akan menjerumuskan nasabah dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam artian nasabah secara sadar dan cermat dalam bertindak dan menjaga aset yang diamanahkan Allah SWT selama dalam penggunaannya, sehingga

⁵Fatwa DSN-MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000

dapat dipastikan aset tersebut memang benar dan patut untuk ditindaklanjuti disebabkan kerusakan dan atau kecelakaan murni bukan dari kelalaian dan kesengajaan dari pihak nasabah.

Menurut Bapak Asy'ari selaku Ketua dewan Syurya Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, mengenai pembulatan besaran premi tidak ada komentar dari beliau. Tentang dana tabarru apabila hingga jatuh tempo tidak dapat dikembalikan kepada nasabah maka hal tersebut sama dengan memakan harta secara zhalim. Mengenai besaran uang yang mesti dibayarkan oleh nasabah sebesar ketentuan dalam lembar polis asuransi ketika mereka terkena resiko yang dipertanggungkan, maka hal tersebut kembali pada perjanjian (akad). Mengenai peng-cover-an asuransi dari nasabah perusahaan bisnis konvensional masih diperbolehkan, dikarenakan mereka justru dalam pelaksanaannya akan mengikuti keputusan dari asuransi syariah. Mengenai klaim nasabah yang tidak dapat di-cover dengan suatu alasan tertentu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Menurut Bapak Ivan selaku Aktivis Hizbut Tahrir Kalimantan Barat, mengenai pembulatan justru mengarah kepada riba' dengan solusi kembali kepada syariah dengan menjelaskan bagaimana proses terjadinya jaminan/asuransi yaitu tidak adanya pembayaran premi. Dana tabarru apabila tidak dikembalikan maka mengandung unsur judi atau maysir, karena nasabah menyimpan dana dengan ketidak adanya kepastian, hal ini menandakan dia bertaruh, kalau-kalau ada kejadian dia dapat, kalau tidak ada kejadian dia siap kehilangan. Dalam asuransi/jaminan Islam tidak ada besaran uang yang harus dibayarkan oleh nasabah yang ditentukan, artinya kalau mau menjamin seseorang itu tanpa syarat. Asuransi yang dikatakan syariah meng-cover dari nasabah perusahaan bisnis konvensional, apalagi ditambah dengan transaksi-transaksi konvensional semakin

menunjukkan bahwa asuransi syariah tidaklah syariah. Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa tidak ada apabila ada unsur klaim, hal ini nasabah seperti berjudi, bisa dapat klaim bisa juga kehilangan terkait ada resiko atau tidak ada resiko. Apalagi kalau klaim tidak diakui berarti ada ketidakjelasan (gharar).

Menurut Bapak Maulana Shiddiq selaku anggota di Jama'ah Tabligh Kalimantan Barat, mengenai pembulatan angka pada premi memiliki pandangan satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan dan itu mengarah pada riba'. Mengenai dana tabarru' yang tidak dikembalikan setelah jatuh tempo lebih mengarah kepada memakan harta sesama dengan cara zhalim. Mengenai besaran uang yang mesti dibayarkan pada saat nasabah terkena resiko mengandung unsur pengikatan kepada nasabah dikarenakan di waktu tersebut dari pihak asuransi mencairkan sejumlah dana untuk menanggung resiko yang dialami nasabah, sehingga pihak asuransi menarik sejumlah uang kepada nasabah sesuai kesepakatan bila terjadi resiko untuk menaggulangi cadangan dana klaim dari nasabah lain.

Adapun saran dari Ustadz Didik Nur Haris selaku ketua IKADI Kalimantan Barat pada saat wawancara dengan beliau, apabila mengalami hal yang demikian, maka dibenarkan untuk melakukan akad (perjanjian) tambahan mengenai pembayaran premi dengan dalil dari Hadits yang menyatakan bahwa seorang mukmin adalah mereka yang taat kepada perjanjian:

المسلمون على شروطهم إلا شروتا حرم حلال أو أحل حراما
(رواه الترمذي من عمر بن عوف)

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁶

Adapun pembayaran sejumlah uang oleh nasabah kepada pihak asuransi ketika terjadi resiko dan asuransi mencairkan dana pada saat tersebut untuk menanggulangi klaim nasabah merupakan suatu pengikatan antara kedua pihak dengan tujuan uang tersebut digunakan sebagai cadangan klaim nasabah yang lain.

⁶ Hadits Riwayat At-Tirmidzi dari ‘Umar bin ‘Auf

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fatwa Kegiatan Ekonomi bersifat mengikat dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Dalam kegiatannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Asuransi Syariah, Bank Syariah, Unit Usaha Syariah pada badan usaha konvensional, dan Permodalan Syariah melakukan kegiatannya dengan menjalankan produk syariah, sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi jalannya kegiatan perekonomian berlandaskan syariat Islam.
2. Dalam pelaksanaannya asuransi syariah mampu menangani permasalahannya berkenaan dengan klausula syari'ah, diantaranya:
 - a. Pembulatan dana premi nasabah yang mengindikasikan timbulnya riba' diatasi dengan melakukan perhitungan pembulatan ke bawah berdasarkan nominal dalam bentuk uang kartal yang berlaku sesuai Fatwa DSN-MUI tentang Deposito Syariah dalam Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 ayat 3 (tiga) dan 4 (empat).
 - b. Peng-cover-an polis asuransi nasabah konvensional diperbolehkan selama tidak mengandung unsur gharar dengan cara nasabah menjelaskan secara rinci asal harta yang dipergunakan untuk membeli aset yang dijamin dan penggunaan aset tersebut tidak menyalahi klausula haram dan klausula syariah oleh nasabah.

- c. Persetujuan klaim aset nasabah ditinjau dari 2 (dua) sisi yakni moral hazard dan physical hazard serta ketentuan yang tertera dalam buku polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi syariah.
- d. Pembebanan biaya persetujuan klaim kepada nasabah bertujuan supaya nasabah bertanggungjawab atas resiko yang terjadi pada harta bendanya dikarenakan harta tersebut sejatinya adalah amanah yang dipercayakan Allah SWT untuk dijaga dan dirawat oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Bulughul Maram, hadits No. 1494

Fatwa DSN-MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000

Hadits Riwayat At-Tirmidzi dari 'Umar bin 'Auf

Hadits Riwayat At-Tirmidzi dari 'Umar bin 'Auf

¹ http://aanzainul-belajar.blogspot.com/2012/09/asuransi-syariah-tinjauan-sejarah-dan_18.html . Sabtu, 15 Juni 2013 Pukul 07.13 WIB

¹ [http://hukum.kompasiana.com/2012/12/26/statemen-menteri agama-suryadharma-ali-dan-menko-kesra-agung-laksono-terhadap-fatwa mui-514185.html](http://hukum.kompasiana.com/2012/12/26/statemen-menteri-agama-suryadharma-ali-dan-menko-kesra-agung-laksono-terhadap-fatwa-mui-514185.html), Rabu, 17 April 2013, pukul 00.37

¹ <http://www.merdeka.com/peristiwa/fatwa-mui-tidak-mengikat.html>, Rabu, 17 April 2013 pukul 00.05 WIB

Silvia Saraswati, 2009, Cara Mudah Menyusun Proposal, Tesis, Skripsi, Disertasi, Yogyakarta: Ar. Ruz Media, Hal. 71

Thomas Patrick. dalam M.M.Billah. *Principles And Practices Of Takaful And Insurance Compared*, International Islamic University. Malaysia, 2001, hal 4